

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

450 Keluarga Korban Manggarai Gratis Setahun Sewa Rusun Pasar Rumput

JAKARTA (Poskota) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang menggratiskan biaya sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput selama satu tahun untuk warga korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan. Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengungkapkan, pihaknya memprioritaskan warga terdampak kebakaran agar mendapatkan hunian yang berkualitas. Kebijakan tersebut berlaku sejak Minggu (27/10/2024).

"Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini," ucapnya saat mendampingi Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mendagri, Tito Karnavian meninjau Rusun Pasar Rumput. Tercatat total sebanyak 1.172 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal dalam kebakaran yang melanda 21 RT dari 3 RW di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, pada 13 Agustus 2024 lalu. "Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat ada 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga sudah menggratiskan biaya sewa Rusunawa Pasar Rumput selama 3 bulan pasca kebakaran,"

ungkap Teguh. Ia menambahkan, sesuai arahan Menteri PKP RI, harga sewa unit di Rusunawa Pasar Rumput sebesar Rp1.250.000 per bulan per unit. Prioritas penyewanya adalah individu atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, diutamakan masyarakat terprogram (terdampak program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, seperti penertiban kota, bencana alam, dan kondisi sejenis). Selain itu, juga untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, anggota TNI/Polri dengan pangkat/golongan rendah, serta masyarakat generasi milenial yang belum memiliki rumah.

"Rusunawa ini memiliki 1.984 unit yang tersebar di tiga tower hunian, dilengkapi fasilitas seperti ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, balkon, dan pendingin ruangan (*Air Conditioner/AC*). Untuk mempermudah proses pendaftaran agar lebih efisien dan tepat sasaran, calon penghuni dapat mengakses website 'SIRUPA' milik Perumda Pasar Jaya," jelas Teguh.

Di Rusunawa Pasar Rumput terdapat dua tipe hunian, yaitu tipe hook seluas 38 m² dan tipe standar seluas 36 m². Kedua tipe ini masing-masing memiliki fasilitas seperti *homogeneous tile* 60x60, toilet duduk dan *shower, plafon exposed, engineering door accessories* ex dorma, kusen jendela aluminium *powder coating*, daya listrik 1.300 watt, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan keramik kamar mandi roman. Di luar unit hunian, tersedia pula fasilitas pendukung meliputi pasar tradisional, sekolah Pendidikan



Pj. Gubernur Teguh bersama Menteri Tito Karnavian dan Maruarar Sirait meninjau Rusunawa Pasar Rumput yang diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

kan Anak Usia Dini (PAUD), balai warga, minimarket, *food court*, ATM *center*, perpustakaan, dan masjid. "Kami terus berkomitmen untuk menyediakan akses perumahan layak huni dengan fasilitas memadai dan harganya terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Karena kami sadar betul hunian merupakan kebutuhan dasar warga dan pemerintah wajib mengupayakannya," ujar Teguh Setyabudi.

ADIL DAN TRANSPARAN
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ima Mahdiah berpesan kepada Pemprov DKI Jakarta agar

menerima calon penghuni Rusunawa Pasar Rumput melalui mekanisme yang adil dan transparan. Dengan demikian, semua warga Jakarta bisa merasakan manfaatnya secara merata. "Kami dari legislatif berpesan kepada Bapak Pj. Gubernur untuk benar-benar memperhatikan cara penerimaan calon penghuni dengan pengawasan yang ketat dan memiliki transparansi yang jelas. Sehingga, warga yang membutuhkan hunian bias merasakan manfaatnya," kata Ima Mahdiah.

Sementara itu, saat meninjau Rusun Pasar Rumput, Menteri PKP RI Maruarar Sirait mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta

atas komitmennya dalam mewujudkan hunian layak dan mengedepankan konsep keadilan untuk semua. Sebab, hunian tersebut digratiskan bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan, selama satu tahun. "Kami juga senang dengan upaya Pemprov DKI yang bergerak cepat dalam mengungsikan korban kebakaran Manggarai dengan menyediakan 418 unit gratis sewa selama setahun hingga 27 Oktober 2025," tutur Menteri Maruarar.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menyatakan, upaya pemerintah untuk menggratiskan

biaya sewa merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

"Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas. Prioritas utama adalah kepada rakyat yang *low class*, yang mereka tidak punya rumah. Itu nomor satu. Diharapkan, kebijakan ini dapat tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ini, sehingga dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain," papar Tito.

PEMBERDAYAAN EKONOMI PENGHUNI

Sedangkan Herlily, Dosen Fakultas Teknik Departemen Arsitektur Universitas Indonesia (UI) menilai, penempatan warga korban kebakaran di Rusunawa Pasar Rumput telah sesuai dengan fungsi rusun itu sendiri, yaitu diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam hal ini, warga Manggarai yang terkena musibah.

Kendati demikian, ia mengingatkan, program pemberian hunian ini harus diikuti dengan pendampingan program pemberdayaan ekonomi terhadap penghuni. "Selain memberikan hunian, pasti program ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi penghuni itu sendiri. Bagaimana mereka bukan hanya sekadar memperoleh hunian, tetapi selama tinggal di rusun dapat mendukung ekonomi agar dapat bangkit kembali," tandasnya.

Pasalnya, ketika warga direlokasi, bisa dipastikan ekonomi domestik hilang, seperti usaha rumahan yang selama ini menjadi sumber pendapatan. Dengan demikian, saat mereka harus membayar sewa rusun setelah setahun, para penghuni secara ekonomi sudah siap. "Untuk hal ini, dibutuhkan kolaborasi perangkat daerah lainnya. Misalnya, dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan kios usaha atau dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta untuk ketenagakerjaan," imbuhnya.